



BUPATI KARAWANG  
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI KARAWANG  
NOMOR 98 TAHUN 2023

TENTANG

PETA BATAS DESA MULANGSARI KECAMATAN PANGKALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARAWANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka tertib administrasi pemerintahan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah administrasi Desa di Kabupaten Karawang, telah diselenggarakan penegasan batas Desa;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, hasil penegasan batas Desa perlu disahkan dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penataan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 155);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2019 Nomor 4).

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA MULANGSARI KECAMATAN PANGKALAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Karawang.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah bupati karawang.
4. Kecamatan adalah perangkat daerah yang dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan.
5. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Batas Desa adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
8. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
9. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
10. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti gilir/punggung gunung/pegunungan (watershed), median sungai dan/atau unsur buatan cilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
11. Penegasan batas Desa adalah adalah proses penetapan batas Desa secara kartometrik di atas suatu peta dasar yang disepakati.
12. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
13. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.
14. Titik Kartometrik selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
15. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar Provinsi/Kabupaten/Kota yang diletakkan tepat pada batas antar Daerah Provinsi/Kabupaten/Kota.
16. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang digunakan untuk menentukan lokasi di belahan bumi bagian Selatan terhadap garis khatulistiwa.

17. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal dibelahan bumi bagian Timur yang menghubungkan titik Kutub Utara dengan titik Kutub Selatan bumi.

#### Pasal 2

Ruang lingkup dalam Peraturan Bupati ini, meliputi:

- a. batas wilayah;
- b. titik koordinat; dan
- c. peta batas Desa.

### BAB II BATAS WILAYAH

#### Pasal 3

Batas wilayah administrasi Pemerintahan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan, sebagai berikut :

- a. batas sebelah Utara : Kabupaten Bekasi;
- b. batas sebelah Timur : Desa Ciptasari Kecamatan Pangkalan dan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan;
- c. batas sebelah Selatan : Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan;
- d. batas sebelah Barat : Kabupaten Bekasi.

#### Pasal 4

Batas Wilayah Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan adalah sebagai berikut :

- a. Batas Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Ciptasari Kecamatan Pangkalan:
  1. Dimulai dari TK 32.15.02.2001-02.2004-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 20,790''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 43,293''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Ciptasari, Desa Jatilaksana, dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
  2. Selanjutnya ke arah barat laut melewati kebun hingga bertemu Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 18,527''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,612''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah barat mengikuti pematang sawah hingga bertemu jalan lingkungan yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 17,350''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 35,220''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah utara mengikuti pematang sawah hingga bertemu Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 6,818''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 36,081''$  BT; dan
  5. Selanjutnya ke arah barat laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciptasari dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan dengan Kabupaten Bekasi yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2007-32.16-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 4,799''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 33,421''$  BT.

- b. Batas Mulangsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Jatilaksana Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 12,617''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,211''$  BT sebagai simpul batas antara Desa Ciptasari, Desa Jatilaksana, dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
  2. Selanjutnya ke arah utara melewati persawahan hingga bertemu Jalan Jati yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 33,240''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 39,341''$  BT; dan
  3. Selanjutnya ke arah timur laut melewati persawahan hingga bertemu simpul batas antara Desa Ciptasari, Desa Jatilaksana, dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2001-02.2004-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 28' 20,790''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 43,293''$  BT.
- c. Batas Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan dengan Desa Kertasari Kecamatan Pangkalan:
1. Dimulai dari TK 32.01-32.15.02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 21,177''$  LS dan  $107^{\circ} 10' 26,683''$  BT sebagai simpul batas antara Kabupaten Bogor dengan Desa Kertasari, Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan;
  2. Selanjutnya ke arah tenggara mengikuti Jalan Raya Medalsari hingga bertemu Sungai Cibeet yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-001 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 26,747''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 30,102''$  BT;
  3. Selanjutnya ke arah utara mengikuti Sungai Cibeet hingga bertemu sawah yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-002 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 8,008''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 49,879''$  BT;
  4. Selanjutnya ke arah tenggara melewati sawah hingga bertemu kebun yang terletak pada TK 32.15.02.2006-02.2007-003 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 8,788''$  LS dan  $107^{\circ} 11' 54,208''$  BT;
  5. Selanjutnya ke arah timur melewati perkebunan hingga bertemu simpul batas antara Desa Jatilaksana, Desa Kertasari dan Desa Mulangsari Kecamatan Pangkalan yang terletak pada TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000 dengan koordinat  $6^{\circ} 29' 12,617''$  LS dan  $107^{\circ} 12' 41,211''$  BT.

### BAB III PETA BATAS DESA

#### Pasal 5

- (1) Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 yang dituangkan dalam bentuk daftar titik kartometrik sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama dusun, Desa, dan/atau Kecamatan.

Pasal 6

Penegasan Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 merupakan penentuan batas wilayah Desa secara administrasi sehingga tidak mengubah, mengurangi, menambah atau menghapuskan luasan dan batas kawasan tertentu, hak atas tanah, hak ulayat, dan hak adat serta hak-hak lainnya pada masyarakat.

Pasal 7

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

Pemerintahan Daerah dan Pemerintahan Desa melakukan penyesuaian administrasi kependudukan dan hal-hal lain yang terkait di dalam wilayah batas Desa yang sudah dipetakan paling lambat 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diundangkan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang.

Ditetapkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**



BUPATI KARAWANG,

CELICA NURRACHADIANA

Diundangkan di Karawang  
pada tanggal **5 April 2023**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
KARAWANG,



ACEP JAMHURI

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2023  
NOMOR **98** .

LAMPIRAN I  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 98 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA MULANGSARI KECAMATAN PANGKALAN

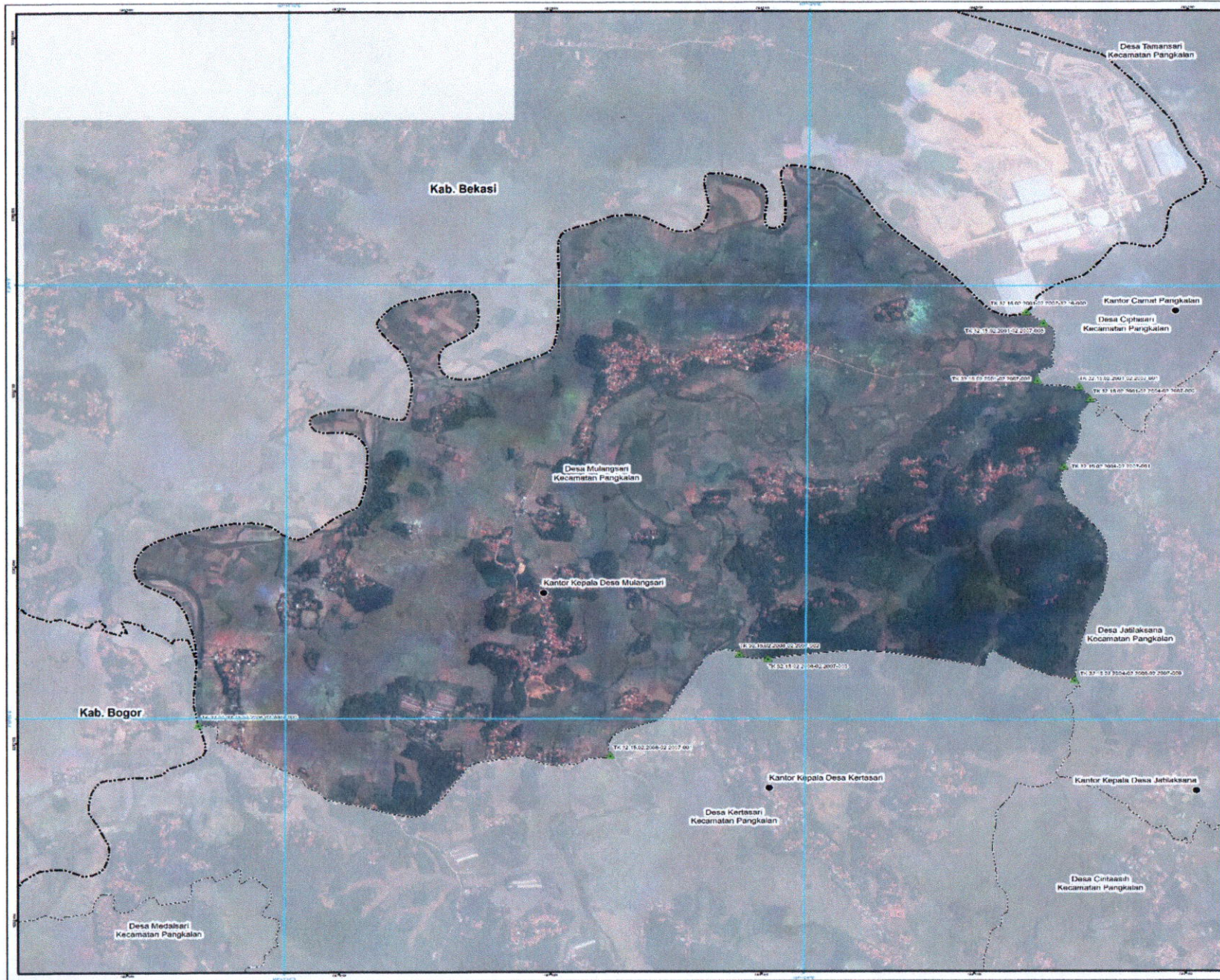
DAFTAR TITIK KARTOMETRIK BATAS DESA MULANGSARI

KODE DESA	NAMA DESA	NAMA TITIK KARTOMETRIK	KOORDINAT GEOGRAFIS		KOORDINAT UTM ZONA 48 S	
			BUJUR TIMUR	LINTANG SELATAN	X_BT	Y_LS
1	2	3	4	5	6	7
32.15.02.2007	MULANGSARI	TK 32.15.02.2001-02.2007-32.16-000	107° 12' 33,421" BT	6° 28' 4,799" LS	744342,9793	9284530,4
		TK 32.15.02.2001-02.2007-002	107° 12' 41,612" BT	6° 28' 18,527" LS	744592,8926	9284107,45
		TK 32.15.02.2001-02.2007-003	107° 12' 35,220" BT	6° 28' 17,350" LS	744396,5713	9284144,49
		TK 32.15.02.2001-02.2007-004	107° 12' 36,081" BT	6° 28' 6,818" LS	744424,4485	9284468,02
		TK 32.15.02.2001-02.2004-02.2007-000	107° 12' 43,293" BT	6° 28' 20,790" LS	744644,2648	9284037,7
		TK 32.15.02.2004-02.2007-001	107° 12' 39,341" BT	6° 28' 33,240" LS	744521,1325	9283655,66
		TK 32.15.02.2004-02.2006-02.2007-000	107° 12' 41,211" BT	6° 29' 12,617" LS	744573,3241	9282445,37
		TK 32.15.02.2006-02.2007-003	107° 11' 54,208" BT	6° 29' 8,788" LS	743129,1648	9282569,32
		TK 32.15.02.2006-02.2007-002	107° 11' 49,879" BT	6° 29' 8,008" LS	742996,2379	9282593,88
		TK 32.15.02.2006-02.2007-001	107° 11' 30,102" BT	6° 29' 26,747" LS	742385,8958	9282020,68
		TK 32.01-32.15.02.2006-02.2007-000	107° 10' 26,683" BT	6° 29' 21,177" LS	740437,462	9282200,23



LAMPIRAN II  
 PERATURAN BUPATI KARAWANG  
 NOMOR 98 TAHUN 2023  
 TENTANG PETA BATAS DESA MULANGSARI KECAMATAN PANGKALAN

PETA BATAS DESA MULANGSARI



**PETA BATAS DESA**

Kode Wilayah : 32.15.02.2007  
**DESA MULANGSARI**  
 KECAMATAN PANGKALAN  
 KABUPATEN KARAWANG  
 PROVINSI JAWA BARAT

U  
 SKALA 1:19.000



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : SRG 2013

PEMERINTAH KABUPATEN KARAWANG  
 Jl. A. Yani No.1 Karawang  
 Email: info@karawangkab.go.id, Telp. 026-7429800, Fax: 0267-411923  
 © Copyright 2022, All Rights Reserved.

**KETERANGAN**

- Titik Kartometrik
- Fasilitas Umum dan Bangunan Lainnya
- Batas Negara
- Batas Provinsi
- Batas Kabupaten/Kota
- Batas Kecamatan
- Batas Desa/Kelurahan

**Daftar Titik Kartometrik**

NO	NOMOR TITIK	Koordinat Geografis		ELEVASI (m)	KETERANGAN
		Bujur	Lintang		
1	18.02.13.02.2007.001	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
2	18.02.13.02.2007.002	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
3	18.02.13.02.2007.003	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
4	18.02.13.02.2007.004	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
5	18.02.13.02.2007.005	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
6	18.02.13.02.2007.006	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
7	18.02.13.02.2007.007	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
8	18.02.13.02.2007.008	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
9	18.02.13.02.2007.009	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik
10	18.02.13.02.2007.010	102° 00' 00" S	07° 00' 00" E	100	Titik Kartometrik



Sumber Peta : Hasil Pengukuran Lapangan Tahun 2010 - 2020  
 Data Koordinat : Hasil Pengukuran Koordinat Tahun 2015 Peta Pemetaan Kota Wilayah Radix Informasi Geospasial  
 dengan penyediaan keakuratan lebih pada tahun 2022  
 Rincian Peta : Peta ini dibuat berdasarkan hasil penggambaran batas yang dilakukan berdasarkan kesepakatan antar Kepala Desa/Lurah/Camats dan diawasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan SKPD/DPD terkait